

TRANSFORMASI PERAN NATO DALAM MENANGGAPI ANCAMAN RUSIA PASCA INVASI KE UKRAINA: TINJAUAN GEOPOLITIK DAN KEAMANAN KOLEKTIF

Eka Cindy Atsetya¹, Rizki Damayanti²

ekacindyatsetya@gmail.com¹, rizki.damayanti@paramadina.ac.id²

Paramadina Graduate School of Diplomacy, Universitas Paramadina

ABSTRAK

Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 menjadi titik balik penting dalam dinamika keamanan Eropa dan mendorong penilaian ulang strategis dalam tubuh North Atlantic Treaty Organization (NATO). Studi ini meneliti bagaimana peran NATO mengalami transformasi dalam merespons ancaman baru dari Rusia, dengan fokus pada reposisi geopolitik dan mekanisme pertahanan kolektif aliansi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, dengan data sekunder dari dokumen resmi NATO, laporan strategis, dan literatur akademik. Pertanyaan utama yang diajukan adalah apakah respons NATO mencerminkan pergeseran dari strategi pertahanan pasif menuju keamanan yang lebih proaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NATO secara signifikan meningkatkan kesiapan militernya, memperluas keanggotaan (misalnya Finlandia), dan memperkuat pertahanan di kawasan Eropa Timur. Di sisi internal, perbedaan pandangan mengenai pembagian beban dan prioritas strategi masih menjadi tantangan. Studi ini menyimpulkan bahwa transformasi NATO turut membentuk kembali keamanan global pasca Perang Dingin, sekaligus meningkatkan ketegangan geopolitik dengan Rusia.

Kata Kunci: NATO, Rusia, Ukraina, Keamanan Kolektif, Geopolitik, Strategi Pertahanan.

ABSTRACT

The Russian invasion of Ukraine in February 2022 marked a critical turning point in European security dynamics and prompted a strategic reassessment within the North Atlantic Treaty Organization (NATO). This study investigates how NATO's role has transformed in response to the renewed threat from Russia, focusing on the alliance's geopolitical repositioning and collective defense mechanisms. The research applies a qualitative-descriptive method, using secondary sources such as NATO official documents, strategic reports, and academic literature. The central question explores whether NATO's response reflects a shift from defensive deterrence to a more proactive security. Findings indicate that NATO has significantly enhanced its military readiness, expanded its membership (e.g., Finland), and reinforced its eastern flank. Internally, debates over burden sharing and strategic priorities persist among member states. The study concludes that NATO's transformation is reshaping the post Cold War security, reinforcing its relevance while also escalating geopolitical tensions with Russia.

Keywords: NATO, Russia, Ukraine, Collective Security, Geopolitics, Defense Strategy.

PENDAHULUAN

Invasi militer Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 tidak hanya mengguncang stabilitas keamanan kawasan Eropa Timur, tetapi juga menandai kebangkitan kembali ancaman konvensional terhadap tatanan keamanan internasional pasca Perang Dingin. Konflik ini memperlihatkan bahwa ancaman militer antarnegara belum sepenuhnya hilang dari panggung hubungan internasional, bahkan justru meningkat di tengah berbagai bentuk rivalitas geopolitik. Bagi NATO agresi Rusia bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Ukraina, tetapi juga sebagai tantangan langsung terhadap sistem pertahanan kolektif yang telah dibangun sejak 1949.

Sebagai aliansi militer terbesar di dunia, NATO merespons krisis tersebut dengan langkah-langkah signifikan, mulai dari penempatan pasukan tambahan di wilayah Eropa

Timur, peningkatan anggaran pertahanan, hingga memperluas keanggotaannya dengan menerima Finlandia dan Swedia (NATO, 2023). Respon ini mencerminkan adanya transformasi strategis, di mana NATO tidak lagi sekadar mengedepankan strategi deterensi pasif, tetapi juga mengambil pendekatan proaktif dalam menjaga stabilitas kawasan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran NATO berubah secara substantif dalam menanggapi ancaman dari Rusia pasca invasi ke Ukraina, serta bagaimana perubahan tersebut berimplikasi terhadap keamanan global. Penelitian ini menggunakan pendekatan geopolitik dan teori keamanan kolektif sebagai landasan teoretis, untuk memahami transformasi struktur dan strategi NATO sebagai respons terhadap dinamika keamanan kontemporer (Mearsheimer, 2001; Walt, 1987). Fokus utama adalah bagaimana NATO mengadaptasi diri terhadap ancaman yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga berdimensi politik dan ekonomi.

Penelitian ini juga berupaya untuk mengetahui bagaimana NATO beradaptasi dan merestrukturisasi strategi pertahanannya guna menghadapi kembali ancaman militer konvensional di kawasan Euro-Atlantik. Fokus analisis diarahkan pada dimensi kebijakan, institusional, dan strategis yang mencerminkan transformasi NATO pasca 2022. Urgensi kajian ini terletak pada meningkatnya ketegangan antara NATO dan Rusia yang berpotensi memperburuk fragmentasi global dan polarisasi di antara blok kekuatan dunia. Selain itu, transformasi NATO juga menjadi indikator penting dalam melihat arah baru sistem keamanan internasional yang semakin multipolar dan penuh ketidakpastian.

Latar belakang invasi Rusia ke Ukraina

Invasi militer Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 merupakan eskalasi serius dari konflik yang telah berlangsung sejak 2014, ketika Rusia mencaplok Semenanjung Krimea dan mendukung kelompok separatist pro-Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk. Akar dari konflik bersumber pada ketegangan geopolitik antara Rusia dan Barat, khususnya terkait perluasan pengaruh Uni Eropa dan NATO ke wilayah yang dianggap sebagai *near abroad* oleh Moskow yaitu negara-negara bekas Uni Soviet yang dianggap sebagai zona pengaruh tradisional Rusia (Hill & Gaddy, 2013). Hal ini berkaitan erat dengan dinamika geopolitik antara Rusia dan Barat, khususnya terkait dengan perluasan pengaruh NATO dan UE ke wilayah Eropa Timur, yang oleh Rusia dipandang sebagai zona pengaruh tradisionalnya (Mearsheimer, 2014).

Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa ekspansi NATO ke timur, termasuk kemungkinan keanggotaan Ukraina, merupakan ancaman eksistensial bagi keamanan nasional Rusia (Putin, 2021). Dalam pandangan ini, Ukraina yang pro-Barat dianggap sebagai perpanjangan tangan dari strategi pengepungan Barat terhadap Rusia. Selain itu, Rusia menuding pemerintah Ukraina melakukan pelanggaran hak-hak warga berbahasa Rusia, terutama di wilayah Donbas, sebagai pembenaran atas intervensi militernya dan memperkuat narasi perlindungan terhadap minoritas etnis Rusia (Allison, 2014; Sakwa, 2015).

Dari sudut pandang hukum internasional, tindakan Rusia dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan dan integritas teritorial negara, sebagaimana diatur dalam Piagam PBB Pasal 2(4) (UNGA/ United Nations General Assembly, 2022). Sebagian besar komunitas internasional mengutuk tindakan Rusia, dan Dewan Umum PBB pada Maret 2022. Respon internasional datang dalam bentuk kecaman luas, sanksi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia, serta peningkatan dukungan militer dan politik bagi Ukraina dari negara-negara Barat, khususnya anggota NATO dan Uni Eropa (Council of the European Union, 2022; BBC News, 2022).

Invasi ini juga memicu dampak global, termasuk krisis pengungsi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II, lonjakan harga energi dan pangan global, serta peningkatan

ketegangan militer antara Rusia dan NATO. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam sistem keamanan internasional pasca Perang Dingin dan membuka kembali diskursus mengenai relevansi dan peran strategis NATO di kawasan Eropa (Freedman, 2022).

Relevansi NATO dalam konteks ancaman kontemporer

Meskipun dibentuk pada tahun 1949 sebagai aliansi pertahanan kolektif untuk menghadapi ancaman Uni Soviet di era Perang Dingin, NATO tetap relevan hingga hari ini dengan terus berevolusi menghadapi ancaman kontemporer yang lebih kompleks dan multidimensional. Sejak berakhirnya Perang Dingin, NATO telah memperluas mandatnya dari pertahanan teritorial menjadi pengelola krisis global, penanggulangan terorisme, hingga respons terhadap serangan siber dan ancaman hibrida (Yost, 2010).

Invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 menjadi momen krusial yang menegaskan kembali pentingnya keberadaan NATO sebagai penjaga stabilitas kawasan Euro-Atlantik. Ancaman militer konvensional dari negara berdaulat yang sempat dianggap menurun kembali nyata, mendorong NATO untuk memperkuat kehadiran militernya di Eropa Timur, memperluas keanggotaannya (seperti Finlandia), dan meningkatkan interoperabilitas serta kesiapsiagaan kolektif (NATO, 2022).

Selain itu, NATO juga menghadapi tantangan baru yang bersifat non tradisional seperti disinformasi, perang siber, penggunaan energi sebagai senjata geopolitik, dan dampak perubahan iklim terhadap keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa NATO bukan hanya institusi militer, tetapi juga *platform* strategis adaptif yang menjembatani kepentingan politik dan pertahanan di tengah dunia yang semakin multipolar dan tidak menentu (Schreer & Chuter, 2023).

Dalam situasi geopolitik yang semakin kompleks, penting untuk memahami bagaimana NATO menyesuaikan peran dan strateginya, bagaimana hal tersebut berdampak terhadap sistem keamanan internasional, serta bagaimana NATO mentransformasikan perannya dalam merespons ancaman Rusia pasca invasi ke Ukraina. Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh NATO, seperti perluasan keanggotaan dan peningkatan kesiapan militer di Eropa Timur, merupakan keputusan yang berlatar belakang pada kebutuhan untuk mempertahankan kredibilitas keamanan kolektif di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan analisis deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami dinamika transformasi peran NATO dalam konteks geopolitik pasca invasi Rusia ke Ukraina. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam menggali fenomena secara mendalam melalui interpretasi terhadap data non numerik (Creswell, 2014).

Metode studi kepustakaan digunakan untuk menghimpun data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi NATO (misalnya Strategic Concept 2022), resolusi Majelis Umum PBB (seperti Resolusi ES-11/1), laporan kebijakan dari lembaga think tank internasional (seperti Atlantic Council, Carnegie Europe, dan RAND Corporation), serta artikel akademik yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi (misalnya Foreign Affairs, International Security, dan Survival). Selain itu, sumber berita dari media internasional terpercaya seperti BBC News, Reuters, dan The Economist turut dijadikan bahan analisis kontekstual.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori geopolitik klasik (Spykman, 1944) dan teori keamanan kolektif (Morgenthau, 1948; Waltz, 1979). Teori geopolitik digunakan untuk menjelaskan pentingnya wilayah strategis dan pertimbangan

kekuatan dalam kebijakan NATO, sedangkan teori keamanan kolektif menjelaskan bagaimana aliansi bertindak sebagai mekanisme bersama dalam menanggapi ancaman terhadap satu atau lebih anggotanya. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis, dengan mendeskripsikan kebijakan dan langkah-langkah strategis NATO, lalu menganalisis implikasinya terhadap struktur keamanan kawasan dan global. Penelitian ini bersifat eksplanatif, karena bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang perubahan struktural dan fungsional NATO pasca invasi Rusia (Neuman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 menjadi katalis transformasi besar dalam struktur, strategi, dan orientasi NATO. Krisis ini mendorong aliansi pertahanan trans Atlantik tersebut tidak hanya kembali ke fungsi awalnya sebagai organisasi pertahanan kolektif, tetapi juga bertransformasi menjadi aktor geopolitik proaktif dalam menjaga stabilitas kawasan. Transformasi ini dapat diamati melalui beberapa aspek penting:

Peningkatan Anggaran Pertahanan dan Modernisasi Militer

Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 menjadi titik balik strategis dalam keamanan Eropa dan internasional. Peristiwa ini mendorong negara-negara anggota NATO untuk merevisi bentuk pertahanan mereka secara menyeluruh. Salah satu perubahan paling mencolok terjadi di Jerman, negara yang selama ini mempertahankan kebijakan militer yang moderat dan restriktif pasca Perang Dunia II. Menyikapi krisis tersebut, Kanselir Olaf Scholz pada Maret 2022 mengumumkan kebijakan *Zeitenwende* perubahan era dengan mengalokasikan dana khusus sebesar lebih dari €100 miliar untuk modernisasi militer, termasuk pengadaan jet tempur F-35, helikopter CH-47 Chinook, serta sistem pertahanan udara IRIS-T (*InfraRed Imaging System - Tail/Thrust Vector-Controlled*) dan Arrow-3 (The Economist, 2022).

Keputusan ini menjadi titik balik dalam politik keamanan nasional Jerman dan kawasan Eropa secara keseluruhan, mengingat Jerman sebelumnya enggan memenuhi target pengeluaran pertahanan sebesar 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sebagaimana ditetapkan dalam komitmen NATO sejak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Wales 2014 menandai perubahan strategis aliansi dalam menghadapi ancaman dari Rusia, termasuk peningkatan kehadiran militer di Eropa Timur serta pembentukan Pasukan Tanggap Cepat (*Very High Readiness Joint Task Force/VJTF*) sebagai bagian dari adaptasi strategis NATO terhadap ancaman keamanan regional (NATO, 2022a). Langkah Jerman ini kemudian diikuti oleh negara-negara anggota lainnya yang juga meningkatkan anggaran pertahanan nasional mereka secara signifikan, termasuk Polandia dan Belanda.

Selain Jerman, AS memperkuat kehadiran militernya secara substansial di kawasan Eropa Timur. Langkah ini diwujudkan dengan penempatan pasukan tambahan di Polandia dan Rumania, pendirian markas permanen Korps V Angkatan Darat AS di Poznan, serta penguatan infrastruktur logistik dan radar militer. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strategi *forward presence* untuk memperkuat efek penangkalan (*deterrence*) terhadap kemungkinan eskalasi konflik dari Rusia (U.S. Department of Defense, 2022).

Modernisasi pertahanan NATO pasca invasi mencakup empat aspek utama. Pertama, peningkatan sistem pertahanan udara dan rudal, termasuk melalui pengadaan sistem Patriot dan Aegis Ashore, merupakan langkah strategis NATO dalam memperkuat pertahanan kolektifnya di kawasan Eropa, serta sistem deteksi dini di negara-negara Baltik dan Eropa Tengah. Kedua, peningkatan kapasitas logistik dan mobilitas lintas batas guna mempercepat pengerahan pasukan. Ketiga, peningkatan interoperabilitas melalui pelatihan gabungan dan doktrin terpadu antar anggota. Keempat, modernisasi pertahanan siber dan penguatan *cyber command* dalam menghadapi ancaman digital dan disinformasi, yang juga menjadi bagian

dari taktik hibrida Rusia dalam konflik kontemporer (Atlantic Council, 2023).

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa NATO tidak lagi hanya mengandalkan pertahanan statis, melainkan mengadopsi pendekatan strategis yang lebih proaktif dan dinamis. Transformasi ini mencerminkan penerapan prinsip keamanan kolektif dalam konteks geopolitik kontemporer, di mana daya tangkal tidak lagi hanya bersifat militer konvensional, tetapi juga mencakup dimensi teknologi, ekonomi, dan psikologis. Dalam kerangka teori keamanan kolektif, pergeseran ini menandai peningkatan solidaritas strategis di antara negara anggota untuk menghadapi ancaman eksternal secara komprehensif (Morgenthau, 1948; Waltz, 1979).

Perluasan Keanggotaan: Swedia dan Finlandia

Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 tidak hanya memicu krisis keamanan di Eropa, tetapi juga memaksa dua negara Skandinavia yang selama puluhan tahun menganut prinsip netralitas militer yakni Swedia dan Finlandia untuk secara drastis mengubah orientasi strategis mereka. Langkah keduanya mengajukan keanggotaan ke NATO pada Mei 2022 mencerminkan lonjakan signifikan dalam persepsi ancaman terhadap Rusia di kawasan Nordik (Smith, 2023).

Finlandia secara resmi menjadi anggota ke-31 NATO pada April 2023, menambah sekitar 1.300 km perbatasan langsung NATO dengan Rusia. Sementara itu, proses ratifikasi keanggotaan Swedia sempat tertunda akibat keberatan politik dari Turki dan Hungaria, namun berhasil diselesaikan pada awal 2024 (NATO, 2024). Kedua negara membawa serta kapasitas militer yang relatif kuat dan modern, serta pengalaman operasional yang luas, terutama dalam operasi gabungan dengan NATO sebelum keanggotaan formal.

Dari perspektif geopolitik, bergabungnya Finlandia dan Swedia ke dalam NATO memperkuat posisi strategis aliansi di kawasan Laut Baltik dan Kutub Utara. Perluasan ini menciptakan lanskap keamanan baru di Eropa Utara, yang sebelumnya berfungsi sebagai *buffer zone* antara Rusia dan aliansi Barat. Dalam kerangka teori geopolitik klasik, langkah ini dapat ditafsirkan sebagai pergeseran keseimbangan kekuatan (*balance of power*) yang menguntungkan blok Barat (Spykman, 1944; Brzezinski, 1997).

Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 tidak hanya memicu krisis keamanan di Eropa, tetapi juga memaksa dua negara Skandinavia yang selama puluhan tahun menganut prinsip netralitas militer yakni Swedia dan Finlandia untuk secara drastis mengubah orientasi strategis mereka. Langkah keduanya mengajukan keanggotaan ke NATO pada Mei 2022 mencerminkan lonjakan signifikan dalam persepsi ancaman terhadap Rusia di kawasan Nordik (Smith, 2023).

Lebih jauh, perluasan keanggotaan ini mencerminkan penerapan prinsip *bandwagoning*, yaitu kecenderungan negara-negara kecil atau menengah untuk bergabung dengan koalisi yang lebih kuat guna meningkatkan rasa aman di tengah eskalasi ancaman eksternal (Walt, 1987). Dalam konteks ini, NATO dipandang sebagai *platform* pertahanan yang kredibel karena menyediakan jaminan keamanan kolektif melalui Pasal 5 Piagam Atlantik Utara, yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi.

Namun demikian, perluasan keanggotaan juga membawa potensi risiko eskalasi baru dalam hubungan NATO-Rusia. Moskow merespons dengan menempatkan sistem rudal dan memperkuat unit-unit militernya di wilayah perbatasan, termasuk di Semenanjung Kola dan Kaliningrad. Ketegangan ini mencerminkan dilema keamanan klasik (*security dilemma*), di mana langkah-langkah defensif oleh satu pihak dapat dipersepsikan sebagai ancaman ofensif oleh pihak lain (Herz, 1950; Jervis, 1978).

Pembentukan NATO Response Force dan Eastern Flank Defense

Sebagai respons langsung terhadap eskalasi militer Rusia di Ukraina, NATO

mengambil langkah signifikan dengan mengaktifkan dan memperluas NATO Response Force (NRF), yaitu pasukan siaga tinggi yang terdiri atas komponen darat, laut, udara, dan siber. Pada KTT NATO di Madrid tahun 2022, Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg mengumumkan bahwa jumlah NRF akan ditingkatkan dari sekitar 40.000 menjadi lebih dari 300.000 personel siap tempur (NATO, 2022a). Peningkatan drastis ini mencerminkan kesiapan aliansi untuk merespons ancaman dalam waktu singkat serta memperkuat efek penangkalan (*collective deterrence*), menjadikannya salah satu langkah pertahanan paling ambisius sejak berakhirnya Perang Dingin.

Selain penguatan NATO Response Force (NRF), NATO juga memperluas kehadiran militernya di sayap timur (*Eastern Flank*) dengan menempatkan delapan kelompok tempur multinasional (*multinational battlegroups*) secara permanen di negara-negara seperti Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia, Slovakia, Rumania, Bulgaria, dan Hungaria (NATO, 2023). Penempatan pasukan ini bukan sekadar simbolik, melainkan merupakan implementasi nyata dari doktrin *forward defense*, yaitu strategi pertahanan yang menekankan pentingnya kehadiran militer langsung di garis depan sebagai bentuk pencegahan dini terhadap potensi agresi eksternal (Chivvis, 2022).

Kehadiran pasukan ini juga dilengkapi dengan latihan tempur bersama (*joint exercises*), peningkatan infrastruktur logistik dan mobilitas lintas negara, serta sistem komunikasi terpadu yang memungkinkan pengerahan cepat (*rapid deployment*) jika terjadi serangan. Strategi ini mencerminkan adaptasi NATO terhadap ancaman konvensional dan hibrida yang semakin kompleks dari Rusia, sekaligus memperkuat kredibilitas Pasal 5 Piagam Atlantik Utara, yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota (Wallander, 2023).

Penempatan Pasukan dan Sistem Pertahanan di Baltik dan Eropa Timur

Pasca invasi Rusia ke Ukraina, NATO meningkatkan fokus militernya pada kawasan Baltik dan Eropa Timur yang dianggap sebagai garis depan dalam kemungkinan konflik konvensional dengan Rusia. Negara-negara seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania, serta Polandia dan Rumania, menjadi pusat utama reposisi kekuatan aliansi. Langkah ini mencerminkan strategi *deterrence by denial* yang bertujuan mencegah agresi melalui penempatan kekuatan militer yang kredibel dan segera dapat digerakkan (Lanoszka & Hunzeker, 2022).

Sebagai bagian dari inisiatif tersebut, NATO dan negara-negara anggota utama terutama Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Kanada mengerahkan sistem pertahanan udara seperti MIM-104 Patriot, NASAMS (*Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System*), dan instalasi Aegis Ashore di Polandia dan Rumania. Sistem-sistem ini berfungsi untuk melindungi infrastruktur vital dan populasi sipil dari potensi serangan rudal atau udara Rusia (Missile Defense Advocacy Alliance, 2023).

Selain sistem pertahanan udara, unit-unit tempur multinasional juga secara bergilir ditempatkan di kawasan ini dalam kerangka *enhanced Forward Presence* (eFP). Sebagai contoh, Inggris memimpin kelompok tempur di Estonia, Kanada di Latvia, Jerman di Lithuania, dan Amerika Serikat di Polandia. Penempatan ini didukung oleh pembangunan infrastruktur logistik serta jalur transportasi militer lintas negara yang memungkinkan pengerahan cepat (*rapid deployment*) dalam menghadapi potensi eskalasi konflik. (NATO, 2023).

Kebijakan ini merupakan implementasi langsung dari Pasal 5 Piagam Atlantik Utara, yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi. Dalam konteks tersebut, kehadiran fisik pasukan dan sistem pertahanan tidak semata-mata berfungsi sebagai langkah teknis militer, melainkan juga sebagai sinyal politik strategis kepada Moskow bahwa NATO bersatu serta memiliki

kemauan dan kapasitas untuk merespons setiap pelanggaran terhadap kedaulatan anggotanya. (Ringsmose & Rynning, 2022).

Dinamika Politik Internal NATO

Meskipun NATO menunjukkan soliditas sebagai aliansi militer dalam merespons invasi Rusia ke Ukraina, dinamika internal tetap menjadi tantangan tersendiri. Ketegangan di antara negara-negara anggota terutama berkaitan dengan perbedaan kepentingan strategis, pembagian beban pembiayaan (*burden sharing*), serta persepsi ancaman yang tidak selalu seragam. Amerika Serikat tetap menjadi aktor dominan dalam struktur NATO, baik dari segi kapabilitas militer maupun kontribusi anggaran, dengan menanggung sekitar 70% dari total pengeluaran militer aliansi dan memimpin pengerahan pasukan di Eropa Timur (NATO, 2022). Sementara itu, Jerman menunjukkan perubahan sikap yang signifikan melalui kebijakan *Zeitenwende*, yaitu alokasi anggaran sebesar €100 miliar untuk modernisasi militer. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan birokratis dan dinamika politik domestik. (The Economist, 2023).

Prancis, di sisi lain, meskipun mendukung penguatan pertahanan Eropa, terus mendorong konsep *strategic autonomy* gagasan bahwa Eropa harus lebih mandiri secara militer dan tidak bergantung sepenuhnya pada AS. Presiden Emmanuel Macron bahkan sempat menyebut NATO sebagai *brain dead* pada 2019, meskipun kemudian memperkuat komitmen terhadap aliansi pasca-invasi Ukraina (Macron, 2019; Le Monde, 2022).

Salah satu perdebatan paling lama dalam NATO adalah soal *burden sharing*, yakni bagaimana negara-negara anggota berkontribusi secara adil terhadap anggaran pertahanan kolektif. Hingga 2023, hanya 11 dari 31 negara anggota yang mencapai target 2% dari PDB untuk belanja militer (NATO, 2023). Negara-negara seperti Yunani dan Polandia melampaui target tersebut, sementara banyak negara Eropa Barat seperti Belgia dan Spanyol masih berada di bawah ambang batas, memicu kritik dari Washington.

Selain itu, terdapat perbedaan pendekatan strategis antara negara-negara yang menginginkan NATO lebih fokus pada pertahanan teritorial di Eropa Timur, dengan mereka yang mendorong peran global NATO seperti di Indo-Pasifik. AS dan Inggris cenderung mendorong ekspansi strategis NATO ke wilayah Asia, sementara beberapa negara Eropa bersikap lebih berhati-hati (Hamilton & Spohr, 2023).

Negara-negara Eropa Timur seperti Polandia, Lithuania, dan Estonia memiliki persepsi ancaman yang jauh lebih tinggi terhadap Rusia dibandingkan rekan mereka di Eropa Barat. Hal ini membuat mereka lebih agresif dalam menyerukan penempatan pasukan permanen NATO dan peningkatan anggaran militer. Sebaliknya, negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Italia sering kali menunjukkan pendekatan yang lebih diplomatis, meskipun krisis Ukraina telah menggeser sebagian pandangan ini (Ringsmose & Rynning, 2022). Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam membentuk strategi bersama yang kohesif, namun juga mencerminkan fleksibilitas NATO sebagai aliansi yang mampu menampung spektrum kepentingan nasional yang luas. Mekanisme konsultasi politik di Dewan Atlantik Utara menjadi kunci dalam menjaga kohesi internal di tengah tekanan geopolitik eksternal.

Implikasi Global dari Transformasi NATO Pasca Invasi Rusia ke Ukraina

Transformasi NATO pasca 2022 telah mempercepat polarisasi geopolitik global, khususnya antara blok negara-negara Barat dan aliansi informal yang dipimpin oleh Rusia, dengan dukungan dari Tiongkok dan Iran. Perkembangan ini mencerminkan kemunduran sistem keamanan kolektif global yang berbasis PBB, di mana Dewan Keamanan sebagai lembaga utama dalam penyelesaian konflik internasional mengalami kebuntuan akibat penggunaan hak veto oleh Rusia dan Tiongkok (Acharya, 2023).

Erosi kepercayaan terhadap mekanisme multilateral semakin dalam, terutama setelah

Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi resolusi substantif terkait invasi Rusia ke Ukraina. Sebagai konsekuensinya, diplomasi berbasis blok kembali mendominasi tatanan global, dengan NATO, G7, dan UE memainkan peran yang semakin sentral dalam pengambilan keputusan internasional (Kupchan, 2023). Dinamika ini menimbulkan risiko fragmentasi lebih lanjut terhadap tatanan internasional dan mendorong terbentuknya koalisi strategis baru di luar kerangka hukum internasional formal.

Rusia merespons perluasan NATO dan penguatan militer di Eropa Timur dengan retorika yang semakin agresif, termasuk ancaman penggunaan senjata nuklir taktis di kawasan konflik serta pelaksanaan latihan militer skala besar di dekat perbatasan negara-negara anggota NATO (BBC, 2023). Di samping itu, Moskow juga memperdalam kerja sama militer dan diplomatiknya dengan Tiongkok dan Iran, melalui latihan gabungan angkatan laut serta peningkatan ekspor dan alih teknologi militer (Gabuev, 2022). Eskalasi ini memperbesar risiko konflik terbuka antara kekuatan besar, sekaligus menciptakan dinamika dilema keamanan (*security dilemma*), di mana setiap upaya pertahanan dari satu pihak dapat dipersepsikan sebagai ancaman ofensif oleh pihak lain (Jervis, 1978). Ketegangan strategis ini memperpanjang periode konfrontasi dan menyempitkan ruang diplomasi jangka pendek.

Tiongkok memainkan peran yang ambivalen dalam dinamika konflik ini. Di satu sisi, Beijing menolak memberikan dukungan eksplisit terhadap invasi Rusia dan terus menyerukan prinsip non-intervensi serta penghormatan terhadap kedaulatan negara dalam forum-forum internasional seperti G20 dan BRICS (Ministry of Foreign Affairs PRC, 2023). Namun di sisi lain, Tiongkok juga mengkritik ekspansi NATO dan menyebutnya sebagai faktor yang berkontribusi terhadap eskalasi ketegangan di kawasan Eropa. Dalam jangka panjang, Tiongkok memanfaatkan konflik ini sebagai peluang strategis untuk memperluas pengaruhnya di kawasan *Global South*, melalui penguatan kerja sama ekonomi dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI), pendalaman aliansi melalui BRICS+, serta dorongan terhadap sistem keuangan alternatif, termasuk penggunaan yuan dalam perdagangan internasional. Strategi ini mencerminkan upaya Tiongkok untuk membentuk poros tandingan terhadap dominasi Barat tanpa harus terlibat langsung dalam konflik bersenjata (Wang, 2023).

KESIMPULAN

Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 menjadi pemicu utama perubahan mendasar dalam strategi NATO. Dari yang semula berfungsi sebagai perisai pertahanan kolektif berdasarkan Pasal 5 Piagam Atlantik Utara, NATO telah berevolusi menjadi aktor geopolitik yang lebih proaktif dengan pendekatan strategis yang adaptif dan, dalam beberapa aspek, lebih ofensif. Aliansi ini memperkuat NATO *Response Force* (NRF), meningkatkan kehadiran militer di sayap timur, serta mendorong peningkatan anggaran pertahanan di kalangan negara anggota, termasuk Jerman dan negara-negara Baltik. Perluasan keanggotaan melalui aksesi Finlandia dan Swedia menandai perubahan historis dalam arsitektur keamanan Eropa sekaligus memperluas daya jangkauan NATO terhadap potensi ancaman dari Rusia.

Namun demikian, transformasi ini turut memunculkan tantangan internal, seperti perbedaan orientasi strategis antara Eropa Barat dan Timur, ketegangan dalam pembagian beban pembiayaan (*burden sharing*), serta perdebatan mengenai arah politik jangka panjang aliansi. Secara global, pergeseran ini mempercepat polarisasi geopolitik antara blok Barat dan poros Rusia–Tiongkok, melemahkan legitimasi mekanisme keamanan kolektif berbasis PBB, serta meningkatkan risiko konfrontasi sistemik dalam jangka panjang. Dalam konteks tatanan internasional yang semakin kompleks dan tidak stabil, NATO dihadapkan pada

dilema strategis: bagaimana menjaga kohesi internal sambil tetap responsif terhadap ancaman eksternal, tanpa memicu eskalasi konflik lebih luas.

Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi NATO pasca-invasi Ukraina merefleksikan realitas geopolitik baru, di mana konsep keamanan kolektif harus terus beradaptasi terhadap bentuk ancaman hibrida dan konvensional. Ke depannya, NATO dituntut untuk menyeimbangkan antara kebutuhan strategis, diplomasi multilateral, dan pengelolaan dinamika internal guna mempertahankan relevansi dan stabilitas kawasan Euro-Atlantik.

DAFTAR PUSAKA

- Acharya, A. (2023). Global order after Ukraine: Multilateralism, multipolarity, and the decline of the West. *Foreign Affairs*, 102(4), 45–56.
- Allison, R. (2014). Russia and the post-2014 security architecture. *International Affairs*, 90(6), 1241–1257.
- Atlantic Council. (2023). *Modernizing NATO: New capabilities for a new era*. Washington, DC: Atlantic Council Strategy Papers.
- BBC News. (2022, March 3). Ukraine conflict: How the West is reacting to Russia's invasion. <https://www.bbc.com/news>
- Brzezinski, Z. (1997). *The grand chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives*. New York: Basic Books.
- Chivvis, C. S. (2022). *The threat of Russian expansion and NATO's eastern strategy*. Washington, DC: RAND Corporation.
- Council of the European Union. (2022). EU sanctions against Russia following the invasion of Ukraine. <https://www.consilium.europa.eu>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Deutsch, K. W., et al. (1957). *Political community and the North Atlantic area: International organization in the light of historical experience*. Princeton: Princeton University Press.
- Freedman, L. (2022). Ukraine and the return of war. *Survival*, 64(3), 7–30.
- Gabuev, A. (2022). The dragon and the bear: China-Russia strategic alignment. *Carnegie Endowment for International Peace*.
- George, A. L., & Bennett, A. (2005). *Case studies and theory development in the social sciences*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Hamilton, D. S., & Spohr, K. (2023). *NATO's new strategic concept: Transatlantic unity in an age of strategic rivalry*. Brookings Institution.
- Herz, J. H. (1950). Idealist internationalism and the security dilemma. *World Politics*, 2(2), 157–180.
- Hill, F., & Gaddy, C. G. (2013). *Mr. Putin: Operative in the Kremlin*. Washington, DC: Brookings Institution Press.
- Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. *World Politics*, 30(2), 167–214.
- Kramer, F. D. (2022). *NATO's evolving role after the Ukraine war*. Atlantic Council.
- Kupchan, C. (2023). A bipolar world is emerging. NATO must adapt. *Foreign Policy*.
- Le Monde. (2022). *Après l'Ukraine, Macron redéfinit le rôle de la France dans l'OTAN*.
- Macron, E. (2019). Interview with *The Economist*: "What we are currently experiencing is the brain death of NATO".
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The tragedy of great power politics*. W. W. Norton & Company.
- Mearsheimer, J. J. (2014). Why the Ukraine crisis is the West's fault. *Foreign Affairs*, 93(5), 77–89.
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. (2023). *China's position on the political settlement of the Ukraine crisis*.
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics among nations: The struggle for power and peace*. New York: Knopf.
- NATO. (2022). *Strategic concept 2022*. Brussels: NATO Publications.

- NATO. (2022a). Madrid Summit Declaration, 29 June 2022. Brussels: North Atlantic Treaty Organization. <https://www.nato.int>
- NATO. (2022b). Defence expenditure of NATO countries (2014–2022). Brussels: NATO Public Diplomacy Division.
- NATO. (2023). Strengthening NATO's deterrence and defence posture on the Eastern Flank. NATO Fact Sheet.
- NATO. (2024). NATO welcomes Sweden and Finland as full members. Brussels: NATO Press Release.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Boston: Pearson.
- Putin, V. (2021). Address on security demands and NATO expansion. Retrieved from <https://www.kremlin.ru>
- Ringsmose, J., & Rynning, S. (2022). Why NATO needs political cohesion to survive strategic competition. *International Affairs*, 98(3), 827–844.
- Rynning, S. (2023). NATO's new purpose in a divided world. *International Affairs*, 99(1), 1–18.
- Sakwa, R. (2015). *Frontline Ukraine: Crisis in the borderlands*. London: I.B. Tauris.
- Schreer, B., & Chuter, A. (2023). NATO in the 21st century: Adapting to new threats. *International Affairs*, 99(2), 201–220.
- Smith, H. (2023). Neutrality no more: Finland and Sweden's strategic shift. *Foreign Affairs*, 102(1), 45–57.
- Smith, M. A. (2022). Russia's war in Ukraine and NATO's strategic response. *RUSI Journal*, 167(3), 1–12.
- Spykman, N. J. (1944). *The geography of the peace*. New York: Harcourt, Brace.
- The Economist. (2022). Germany's €100 billion defence reset: Scholz's Zeitenwende. <https://www.economist.com>
- The Economist. (2023). Germany's slow awakening to hard power.
- Tsygankov, A. P. (2013). *Russia and the West from Alexander to Putin: Honor in international relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- UNGA (United Nations General Assembly). (2022). Resolution ES-11/1: Aggression against Ukraine. <https://digitallibrary.un.org/record/3965290>
- U.S. Department of Defense. (2022). Fact sheet: U.S. force posture enhancements in Europe. Washington, DC.
- U.S. Department of State. (2022). U.S. sanctions and export controls against Russia. <https://www.state.gov>
- Walt, S. M. (1987). *The origins of alliances*. Cornell University Press.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Wang, Z. (2023). China's strategic patience: Shaping a new global order. *The Diplomat*, June Edition.
- Wendt, A. (1999). *Social theory of international politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yost, D. S. (2010). *NATO's balancing act*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press.